

**EVALUASI PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)  
DI KECAMATAN GADINGREJO**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**HENDRA SETIAWAN  
NPM. 2016041043**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2024**

## ABSTRAK

### EVALUASI PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DI KECAMATAN GADINGREJO

Oleh

**HENDRA SETIAWAN**

Kemiskinan merupakan masalah serius yang dihadapi oleh banyak daerah di Indonesia tak terkecuali Kecamatan Gadingrejo. Kecamatan Gadingrejo adalah kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu dengan angka kemiskinan tertinggi dengan total jumlah angka kemiskinan mencapai 44.232 jiwa. Oleh karena itu, relevansi program pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting untuk mengatasi kondisi sosial-ekonomi yang ada. Namun, program pemberdayaan yang telah diterapkan belum sepenuhnya optimal dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Gadingrejo dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan Bridgman & Davis yang terdiri dari empat indikator yaitu *input*, *process*, *output*, dan *outcomes*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber terkait, observasi langsung terhadap program, serta dokumentasi dari catatan program dan laporan kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat keberhasilan dalam membantu masyarakat, implementasi KUBE masih menghadapi tantangan signifikan pada indikator *input*, *process*, dan *output*. Permasalahan terkait penggunaan anggaran yang belum optimal, infrastruktur yang kurang memadai, sumber daya yang terbatas, dan koordinasi yang belum optimal menjadi hambatan utama. Namun, dari segi indikator *outcomes*, program ini berhasil memberikan dampak positif yang terlihat dari peningkatan kualitas hidup sebagian masyarakat penerima manfaat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Program KUBE di Kecamatan Gadingrejo telah memberikan kontribusi yang positif namun masih memerlukan evaluasi mendalam untuk memperbaiki aspek-aspek yang belum optimal.

**Kata Kunci:** *Kemiskinan, Evaluasi, KUBE*

## **ABSTRACT**

### **EVALUATION OF THE JOINT BUSINESS GROUP (KUBE) PROGRAM IN GADINGREJO DISTRICT**

**By**

**HENDRA SETIAWAN**

*Poverty is a serious problem faced by many regions in Indonesia, including Gadingrejo District. Gadingrejo District is the sub-district in Pringsewu Regency with the highest poverty rate with a total poverty rate reaching 44,232 people. Therefore, the relevance of community empowerment programs is very important to overcome existing socio-economic conditions. However, the empowerment program that has been implemented has not been fully optimal in overcoming the problem of poverty. This research aims to evaluate the implementation of the Joint Business Group Program (KUBE) in Gadingrejo District using Bridgman & Davis' policy evaluation theory which consists of four indicators, namely input, process, output, outcomes. The research method used is descriptive research with a qualitative approach. Data was collected through in-depth interviews with relevant sources, direct observation of the program, as well as documentation from program notes and activity reports. The research results show that despite success in helping the community, KUBE implementation still faces significant challenges in input, process and output indicators. Problems related to suboptimal budget use, inadequate infrastructure, limited resources, and suboptimal coordination are the main obstacles. However, in terms of outcome indicators, this program has succeeded in providing a positive impact which can be seen from improving the quality of life of some of the beneficiary communities. The conclusion of this research is that the KUBE Program in Gadingrejo District has made a positive contribution but still requires in-depth evaluation to improve aspects that are not yet optimal.*

**Keywords:** *Poverty, Evaluation, KUBE*

**EVALUASI PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA  
(KUBE) DI KECAMATAN GADINGREJO**

**Oleh**

**HENDRA SETIAWAN**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

**Pada**

**Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : EVALUASI PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DI KECAMATAN GADINGREJO

Nama Mahasiswa : Hendra Setiawan

Nomor Pokok Mahasiswa : 2016041043

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

**Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP.**

NIP. 198308152010122002

**Vina Karmilasari, S.Pd., M.Si.**

NIP. 199109242019032019

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

**Meillyana, S.IP, M.A.**

NIP. 197405202001122002

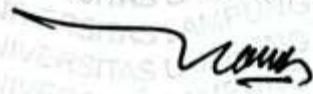
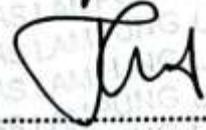
**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP.** .....

**Sekretaris : Vina Karmilasari, S.Pd., M.Si.** .....

**Penguji  
Bukan  
Pembimbing : Dr. Bambang Utoyo S, M.Si.** .....



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dr. Ida Nurhaida, M.Si**

**NIP. 19610807 198703 2 001**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juli 2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lainnya, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 18 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Herindra Setiawan

NPM 2016041043

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Hendra Setiawan, lahir di Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung pada tanggal 24 Januari 2003. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Sutabri dan Ibu Suyati serta memiliki satu orang adik laki-laki bernama Raehan Maulana. Penulis bertempat tinggal di Jalan Branti Raya, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Riwayat pendidikan

yang ditempuh penulis dimulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri Kagungan Ratu yang diselesaikan pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 18 Pesawaran yang berhasil penulis selesaikan pada tahun 2017. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan kembali ke Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu SMA KEBANGSAAN Provinsi Lampung yang diselesaikan pada tahun 2020.

Pada tahun 2020, penulis terdaftar sebagai mahasiswa baru jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti beberapa kegiatan organisasi yang ada di kampus, seperti Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA), Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Forum Studi Pengembangan Islam (UKM-FSPI). Pada Januari- Februari 2023, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tugu Mulya, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat, kemudian dilanjutkan melaksanakan Magang Kampus Merdeka di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu pada bulan Februari- Agustus 2023.

## **MOTTO**

**“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya  
bersama kesulitan ada kemudahan ”**

**(QS. Al-Insyirah : 5-6)**

**“Semua orang memiliki gilirannya masing-masing, bersabar dan tunggulah.  
Itu akan datang dengan sendirinya”**

**(Gold D. Roger)**

**“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak  
akan pernah menjadi takdirku dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan  
pernah melewatkanmu”**

**(Umar Bin Khattab)**

**“Tak masalah kita kalah dalam satu atau dua pertarungan atau malah  
berkali-kali. Tapi pastikan kitalah yang tetap berdiri tegal diakhir semua  
kisah”**

**(Batozar, Komet Minor)**

## PERSEMBAHAN



Alhamdulillahrabbi'l'amin

Segala puji bagi Allah SWT, Dzat yang Maha Sempurna

Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Uswatun Hasanah Baginda  
Rasulullah Muhammad SAW.

Dengan ketulusan hati dan kasih sayang yang besar,

Aku persembahkan karyaku ini sebagai bentuk cinta dan terimakasihku kepada:

### **Kedua Orang Tuaku Tercinta,**

Segala pencapaian ini tidak terlepas dari ridho dan

doa yang telah bapak dan ibu panjatkan kepada Allah Swt. Terimakasih atas segala dukungan, pengorbanan, dan kasih sayang yang tidak terhitung. Semoga pencapaianku ini menjadi awal untuk membuat kalian bangga dan bahagia.

### **Keluarga Besar dan Sahabat,**

Terimakasih atas segala dukungan dan doa yang telah diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga semua doa baik dan kebaikan berbalik kepada kalian.

**Almamater Tercinta,**

**Universitas Lampung**

## SANWACANA

Alhamdulillah, Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Swt. Yang telah mencurahkan segala berkah, ridho, dan hidayah-Nya sehingga telah diselesaikannya skripsi dengan judul “**Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Gadingrejo**” sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Administrasi Negara. Penulis menyadari banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini yang akhirnya dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan, dorongan, serta saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, dengan segala ketulusan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Kepada orang tua penulis Bapak Sutabri dan Ibu Suyati. Terima kasih sudah memberikan cinta dan kasih sayang, doa, serta dukungan setiap harinya. Terima kasih atas segala pengorbanan yang telah dilakukan selama ini, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang lancar, kebahagiaan, dilindungi oleh Allah Swt dimanapun berada, serta keberkahan dunia akhirat. Terima kasih juga kepada adikku Raehan M atas segala bentuk dukungan, doa, dan perhatian yang selama ini diberikan. Semoga kelak dipermudah dalam segala urusan mengejar cita-cita.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial. Terima kasih atas motivasi yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
4. Ibu Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP. selaku Dosen Pembimbing Utama. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan segala ilmu pengetahuan, doa, bimbingan perhatian, motivasi, saran, dan kesabaran dalam proses penyelesaian skripsi. Segala masukan yang ibu berikan menjadi wawasan dan pelajaran untuk saya.

5. Ibu Vina Karmilasari, S.Pd., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Kedua sekaligus Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu dan memberikan segala arahan, tenaga, bimbingan, dan bekal pengetahuan kepada saya dalam menjalani perkuliahan dan dalam proses penyelesaian skripsi. Segala masukan yang ibu berikan menjadi tambahan wawasan dan pelajaran bagi saya.
6. Bapak Dr. Bambang Utoyo S, M.Si selaku Dosen Penguji, terima kasih atas saran dan kritik yang membangun dan mendorong yang diberikan sehingga memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Terima kasih untuk segala dedikasi dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan, semoga dapat menjadi bekal dan pelajaran hidup yang bermanfaat kedepannya.
8. Seluruh staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara terkhusus mba wulan dan mba uki, terimakasih atas segala bantuannya dalam berbagai administrasi dalam kegiatan perkuliahan dan dalam proses skripsi.
9. Keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang diberikan sehingga penulis bisa sampai pada titik ini.
10. Mas-mas print di Dela Printing yang senantiasa siap selalu membantu penulis terutama dalam hal *print out* skripsi. Terimakasih untuk terkadang memberikan secara cuma-cuma draft yang ingin penulis *print out*.
11. Kepada salah satu orang yang menginspirasi penulis, Sam Altman yang sudah menciptakan sebuah *tools* yang sangat berguna bagi banyak orang. Semoga penulis juga bisa membantu banyak orang lewat karya yang penulis ciptakan.
12. Seluruh informan KUBE dan Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu terkhusus kepada Bapak Dedi Akhmadi yang senantiasa memberikan informasi yang begitu jelas kepada penulis.
13. Teman-temanku Ajis, Mbekur, Tole, Gus Yahya, Panjol, Epan dan Yatiman yang selama ini kebersamai penulis selama perkuliahan. Terimakasih untuk senantiasa kebersamai selama ini, terimakasih untuk tawa yang

tercipta selama bersama kalian dan juga terimakasih untuk setiap bantuan yang kalian berikan selama perkuliahan. Semoga kelak kita bisa membentuk *Biji-bijian Company*.

14. Teman-temanku Tole, Yahya, dan Mbekur terimakasih sudah bersedia menjadi salah satu rumah singgah yang begitu nyaman. Terimakasih untuk bantuan dan senyum yang tercipta bersama kalian
15. Kepada teman seperjuanganku, Indra, Ayun, Dinda dan Halwa, terimakasih sudah kebersamai dan membantu penulis dalam banyak hal selama perkuliahan.
16. Kepada semua orang yang pernah hadir di hidup penulis, terimakasih untuk semua pelajaran hidup yang pernah diberikan.
17. Teman-teman FSPI Kabinet Adhara yaitu Wahyu, Kalpin, Indra, Mifta, Faris, Hafis, Bima, Rafi, Ayun, Dinda, Sopfi, Anggita, Desi, Farida, Siska, Laini. Terimakasih untuk pengalaman satu tahun bersama kalian. Berprogres bersama kalian merupakan salah satu nikmat yang penulis syukuri selama ini.
18. Teman teman KKN Pekon Tugu Mulya, Binda, Ridho, Denti, Kezia, Riski, Ica serta seluruh warga Pekon Tugu Mulya terutama Mas Aji, Wahyu, Kelpin, Undi, Aldi, Tia yang sudah kebersamai penulis selama KKN. Terimakasih untuk pengalaman hidup yang sungguh berwarna. Kenangan bersama kalian tidak akan pernah penulis lupakan.
19. Untuk seseorang yang seringkali namanya penulis pinjam dalam doa penulis, terimakasih untuk semangat dan senyum yang tercipta atas kehadiranmu.
20. Teman - teman kelas Reguler A, terima kasih untuk kebersamaan, kerja sama, dukungan yang baik dari awal perkuliahan hingga pada tahap ini.
21. Kepada seluruh teman-teman Adamantia, terima kasih untuk setiap kebersamaan baik suka maupun duka selama masa perkuliahan.
22. Kepada seluruh pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu- persatu.

23. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah di mulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah walau sebenarnya begitu berat untuk melawan rasa malas, serta senantiasa menikmati setiap proses yang bisa dibbilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan.

Pesawaran, Juli 2024

Penulis,

Hendra Setiawan

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	11
2.2 Kebijakan Publik .....	12
2.3 Konsep Evaluasi Kebijakan .....	14
2.4 Pendekatan Evaluasi Kebijakan.....	15
2.5 Metode Evaluasi Kebijakan .....	17
2.6 Indikator Evaluasi Kebijakan.....	18
2.7 Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) .....	20
2.7.1 Definisi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).....	21
2.7.2 Tujuan dan Sasaran Pembentukan KUBE.....	22
2.7.3 Proses Pembentukan KUBE.....	22
2.8 Kerangka Pikir .....	24

<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Tipe Penelitian .....	27
3.2 Fokus Penelitian.....	27
3.3 Lokasi Penelitian.....	28
3.4 Sumber Data .....	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.6 Teknik Analisis Data .....	31
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	33
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
4.1 Gambaran Umum.....	35
4.1.1 Kondisi Demografi.....	37
4.1.2 Kondisi Ekonomi .....	39
4.1.2 Kondisi Sosial Budaya .....	39
4.2 Hasil Penelitian .....	40
4.2.1 <i>Input</i> .....	41
4.2.2 <i>Process</i> .....	57
4.2.3 <i>Output</i> .....	68
4.2.4 <i>Outcomes</i> .....	75
4.3 Pembahasan .....	84
4.3.1 <i>Input</i> .....	85
4.3.2 <i>Process</i> .....	96
4.3.3 <i>Output</i> .....	100
4.3.4 <i>Outcomes</i> .....	105

<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>110</b>
5.1 Kesimpulan .....	110
5.2 Saran .....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>117</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>120</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Table 1. Angka Kemiskinan Kabupaten Pringsewu .....	2
Table 2. Daftar Nama Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Gadingrejo .....	5
Table 3. Penelitian Terdahulu .....	11
Table 4. Teori Evaluasi Kebijakan Bridgman & Davis .....	19
Table 5. Teori Evaluasi Kebijakan William N. Dunn .....	20
Table 6. Informan Penelitian .....	30
Table 7. Dokumentasi Penelitian .....	31
Table 8. Kondisi Demografi Kecamatan Gadingrejo .....	38
Table 9. Tenaga Kerja Pelaksana KUBE .....	51
Table 10. Pendapatan KUBE .....	81
Table 11. Matriks Hasil Penelitian .....	83
Table 12. Matriks Pembahasan .....	95
Table 13. Matriks Pembahasan .....	100
Table 14. Matriks Pembahasan .....	105
Table 15. Matriks Pembahasan .....	109

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Komponen Dalam Analisis Data (interactive model).....	33
Gambar 2. Peta Wilayah Kecamatan Gadingrejo .....	36
Gambar 3. Permensos No. 2 Tahun 2019 .....	45
Gambar 4. Kompor Gas KUBE Manunggal.....	46
Gambar 5. Kompor Gas KUBE APBD .....	55
Gambar 6. Mesin EDC .....	56
Gambar 7. Rapat Anggota KUBE .....	59
Gambar 8. Penyaluran Bantuan KUBE.....	59
Gambar 9. Penyaluran Bantuan BPNT.....	62
Gambar 10. Penerima BPNT.....	63
Gambar 11. Warung KUBE JOGJA JAYA .....	70
Gambar 12. Warung KUBE JOGJA JAYA.....	73
Gambar 13. Berita Penghentian Penyaluran BPNT.....	75
Gambar 14. Laporan Bulanan Kelompok KUBE.....	78
Gambar 15. Transaksi Jual Beli di Warung KUBE .....	79
Gambar 16. Pendapatan KUBE Tambah Brokah .....	80
Gambar 17. Pendapatan KUBE Tambah Brokah .....	80

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan isu strategis dalam pembangunan di sebuah negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Todaro (2003) menyatakan bahwa pembangunan harus berupaya untuk menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran. Kemiskinan merupakan persoalan sosial yang kompleks dan melibatkan banyak aspek yang saling terkait. Sebagaimana pendapat Wrihatnolo (2002), kemiskinan memiliki sifat multidimensional yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti aspek ekonomi, sosiologis, antropologis, kebijakan, teknologi, dan perubahan global. Kemiskinan juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan, pendidikan, kemampuan ekonomi, dan partisipasi politik masyarakat dalam sebuah negara. Meskipun pembangunan infrastruktur dapat membantu memacu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran, namun kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi yang memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi.

Undang-Undang No. 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan mencantumkan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Untuk mengatasi kemiskinan, diperlukan kebijakan berbasis pemberdayaan ekonomi dan komunitas sosial. Program pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu program utama dalam upaya mengatasi permasalahan kemiskinan. Salah satu strategi penurunan kemiskinan yang penting adalah dengan meningkatkan pendapatan seperti

peningkatan akses permodalan, pengembangan keterampilan dan layanan usaha, serta pengembangan kewirausahaan dan kemitraan.

Kecamatan Gadingrejo sebuah bagian dari Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung dengan populasi mencapai 82.694 jiwa yang tersebar di 23 Pekon/Desa. Menariknya, Kecamatan Gadingrejo memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di seluruh Kabupaten Pringsewu, dengan 44.232 jiwa yang memerlukan perhatian khusus. Namun, ada ketidaksesuaian yang mencolok dalam pendistribusian bantuan kemiskinan, dimana hanya sekitar 18% dari penduduk miskin yang menerima bantuan, mencakup penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 1.040 jiwa, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sebanyak 4.037 jiwa, dan gabungan PKH-BPNT sebanyak 2.863 jiwa (Dinsos Kabupaten Pringsewu, 2023).

**Table 1. Angka Kemiskinan Kabupaten Pringsewu**

No.	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	DTKS (Jiwa)
1.	Adiluwih	37,528	17,569
2.	Banyumas	22,545	13,634
3.	Gadingrejo	82,694	44,232
4.	Pagelaran	54,390	31,171
5.	Pardasuka	36,832	25,916
6.	Pringsewu	84,789	39,850
7.	Sukoharjo	52,044	28,903
8.	Ambarawa	38,309	20,208
9.	Pagelaran Utara	16,028	12,021
	<b>Total</b>	<b>423,837</b>	<b>235,691</b>

*Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, 2023.*

Kadji (2013) mengungkapkan salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui partisipasi aktif seluruh masyarakat dalam sebuah gerakan yang masif. Gerakan ini bertujuan untuk menghilangkan kesan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat juga menunjukkan bahwa mereka memiliki empati yang dalam yang dibangun dari prinsip silih asih, silih asuh, dan silih asah. Beberapa program penanggulangan kemiskinan lainnya yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan sebagainya. Tujuan dari program-program tersebut adalah untuk meningkatkan penghasilan masyarakat yang kurang mampu melalui langkah-langkah seperti meningkatkan akses terhadap sumber daya keuangan, meningkatkan mutu produk dan peluang pemasaran, mengembangkan keterampilan dan layanan untuk usaha, serta mendorong perkembangan kewirausahaan.

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas dasar yang sama yaitu melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga (Permensos No.2 Tahun 2019). KUBE merupakan salah satu contoh program pemberdayaan masyarakat yang digagas oleh pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan. Pada awalnya pembentukan KUBE didasari atas peluncuran Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2015 sebagai upaya ekonomi produktif yang melibatkan kelompok-kelompok dengan tujuan meningkatkan usaha produktif kelompok, menyediakan sebagian kebutuhan bagi keluarga yang kurang mampu, mempromosikan hubungan sosial yang harmonis antar warga, mengatasi masalah sosial yang dialami oleh keluarga kurang mampu, serta mendorong pengembangan diri dan berbagi pengalaman antar anggota kelompok. Lalu pada tahun 2019 terdapat pembaruan dasar hukum pembentukan KUBE yang awalnya Permensos No.25 Tahun 2015 menjadi Permensos No.2 Tahun 2019.

Perubahan dasar hukum yang dilakukan tidak merubah keseluruhan dari Permensos No.25 Tahun 2015 melainkan hanya ada penambahan di beberapa bagian.

Berdasarkan Permensos No.2 Tahun 2019 terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan program KUBE. Pihak yang terlibat antara lain adalah Kementerian Sosial yang dalam hal ini adalah sebagai pihak yang berperan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pelaksanaan KUBE, penyusun pedoman teknis pelaksanaan dan penyedia anggaran. Selanjutnya, pihak lain yang terlibat dalam proses pelaksanaan program KUBE adalah Dinas Sosial. Dinas Sosial berperan penting sebagai implementor program di tingkat daerah. Selain itu Dinas sosial juga berperan dalam proses verifikasi calon penerima bantuan, pemberian pelatihan serta melakukan monitoring dan evaluasi. Kemudian pihak lain yang terlibat dalam proses pelaksanaan program ini adalah kelompok usaha itu sendiri dan pendamping sosial baik itu yang berasal dari kecamatan ataupun pendamping dari tingkat desa.

Melalui program KUBE, kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah personal dan kelompok dapat ditingkatkan. Hal ini terjadi lewat dukungan timbal balik antar anggota kelompok. Dampaknya adalah meningkatnya harkat dan martabat kemanusiaan mereka. Secara ekonomi, kegiatan usaha yang dilakukan adalah memberikan kekuatan untuk mengembangkan usaha, mengumpulkan modal, meningkatkan kemampuan bersaing, membangun jaringan usaha, membuka peluang akses ke sumber daya ekonomi, dan menciptakan kegiatan ekonomi yang demokratis (Nurhaswin, 2018).

Berkaitan dengan hal itu, pada tahun 2016 di Provinsi Lampung terdapat 80 KUBE yang telah diprogramkan. Masing-masing anggota dari tiap kelompok usaha berjumlah 10 orang yang terdiri dari masyarakat tidak mampu dan terdaftar dalam Data terpadu Kemiskinan Sosial (DTKS). Dari jumlah 80 tersebut, tersebar ke beberapa Kabupaten/Kota yang ada di

Provinsi Lampung. Adapun untuk jumlahnya adalah 27 KUBE di Kabupaten Pesisir Barat, 26 KUBE di Kabupaten Lampung Utara, 27 KUBE di Kabupaten Lampung Timur, 50 KUBE di Kota Metro dan 27 KUBE di Kabupaten Lampung Barat (Website lampungprov.go.id).

Program KUBE di Kabupaten Pringsewu sendiri mulai berjalan aktif sejak tahun 2016. Yang mana pada awal pembentukannya hanya berjumlah dua kelompok saja. Seiring berjalannya waktu, penambahan kelompok usaha terus bertambah yaitu dua kelompok di tahun 2017, empat kelompok di tahun 2018, dan sembilan kelompok di tahun 2019 (Dinsos Kab. Pringsewu).

**Table 2. Daftar Nama Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Gadingrejo**

No	Pekon	Nama Kube	Kegiatan Usaha Kube	Tahun Berdiri
1	Bulukarto	Makmur Sentosa	Alat Steam Dan Tambal Ban	2017
2	Gadingrejo	Gading Jaya	Alat Pertukangan Konstruksi Baja Ringan	2018
3	Gadingrejo	Lestari	Warung Sembako	2019
4	Klaten	Matahari	Warung Sembako	2019
5	Mataram	Kursi Jaya	Kursi Plastik	2016
6	Panjerejo	Sinar Harapan	Warung Sembako	2019
7	Parerejo	Nusa Unggul	Molen Batu Bata	2016
8	Tambakrejo	Tambah Barokah	Warung Sembako	2019
9	Tegalsari	Butterfly	Warung Sembako	2019
10	Tulung Agung	Tunas Agung	Mesin Molen Batu Bata	2018
11	Tulung Agung	Bambu Seribu	Warung Sembako	2019
12	Wates	Sinar Bahagia	Warung Sembako	2019
13	Wonodadi Utara	Manunggal	Penyewaan Peralatan Kompor Gas	2018
14	Wonosari	Kesuma	Alat Steam Dan Tambal Ban	2017

15	Wonosari	Berkah Sejahtera	Warung Sembako	2019
16	Yogyakarta	Jogja Jaya	Warung Sembako	2019
17	Yogyakarta Selatan	Maju Jaya	Mesin Molen Batu Bata	2018

---

*Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, 2023*

Pada tahun 2023 di Kecamatan Gadingrejo terdapat 17 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang tersebar di berbagai wilayah Kecamatan Gadingrejo. Kelompok Usaha tersebut memiliki jenis usaha yang berbeda seperti warung sembako, sewa peralatan kompor dan alat pembuat batu bata. Dengan bantuan modal sebesar 20 Juta Rupiah yang diberikan kepada setiap kelompok, diharapkan mereka dapat mengembangkan kegiatan usaha ekonomi kreatif di tempat mereka tinggal. Melalui pengembangan usaha ekonomi kreatif, diharapkan dapat menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi, membangun jejaring usaha, dan menciptakan kegiatan ekonomi yang demokratis. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan mereka secara ekonomi.

Peneliti memilih Kecamatan Gadingrejo sebagai fokus penelitian karena kecamatan ini memiliki hal yang cukup unik atau berbeda yaitu mengenai jumlah penduduk miskin terbanyak dari kecamatan lain yang ada di Kabupaten Pringsewu. Hal tersebut menjadi menarik untuk dibahas karena peneliti ingin melihat salah satu upaya pengentasan kemiskinan yaitu dengan pembentukan KUBE yang ada di kecamatan ini apakah sudah sesuai dengan tujuan awal dari upaya pengentasan kemiskinan atau malah melenceng jauh. Selain itu juga program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang ada di Kecamatan Gadingrejo sudah berjalan sejak tahun 2016. Dalam pra-riset yang telah dilakukan di Kelompok Usaha Bersama Kecamatan Gadingrejo ditemukan beberapa permasalahan yaitu:

Pertama, pelaksanaan KUBE masih dinilai kurang efektif, sebab sebagian besar anggota tidak bisa melaksanakan dan melanjutkan usaha yang dijalani. Hal tersebut dapat terlihat dari mulai pasifnya kelompok KUBE hingga ada yang bubar. Hal ini disebabkan kurangnya semangat dan motivasi para anggota dalam menjalankan usahanya. Hal tersebut lantaran pemberian bantuan oleh pemerintah kepada KPM yang tadinya berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kemudian disalurkan lewat KUBE, namun sekarang dialihkan dalam bentuk uang dan disalurkan melalui Kantor Pos (Wawancara dengan Bapak Bowo, TKSK dan pendamping KUBE Kecamatan Gadingrejo, 14 Juli 2023).

Kedua, kurangnya SDM yang bisa mendampingi dalam pelaksanaan usaha. Hal tersebut dapat terlihat dari tidak terpakainya mesin molen pembuatan batu bata di salah satu kelompok KUBE yang ada di desa Klaten. Mesin tersebut hanya sempat digunakan beberapa kali saat awal pembentukan kelompok KUBE, namun sekarang hanya tergeletak begitu saja di rumah ketua kelompok KUBE (Wawancara dengan Bapak Bowo, TKSK dan pendamping KUBE Kecamatan Gadingrejo, 14 Juli 2023).

Ketiga, beberapa usaha yang dijalani kurang dapat membantu dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa anggota kelompok KUBE yang pasif. Mereka memilih untuk melakukan pekerjaan lain dibandingkan menekuni usahanya. Selain itu, sistem manajemen keuangan yang buruk menjadikan masalah tambahan dalam pelaksanaan program KUBE di Kecamatan Gadingrejo (Wawancara dengan Bapak Bowo, TKSK dan pendamping KUBE Kecamatan Gadingrejo, 14 Juli 2023).

Penelitian sebelumnya, seperti yang dijelaskan oleh Putro dkk (2020), implementasi program KUBE masih menunjukkan beberapa hambatan yang menghambat efektivitasnya. Beberapa masalah yang muncul dalam pelaksanaan program KUBE termasuk keterbatasan pelatihan bagi anggota

KUBE, kurangnya pendampingan kelompok, monitoring, dan evaluasi (Monev), serta masalah manajemen kelompok dalam menanggapi permasalahan yang muncul.

Hasil penelitian lain mengenai evaluasi program KUBE, seperti yang dilakukan oleh Qodrat (2017), menyebutkan bahwa salah satu faktor penyebab ketidakefektifan dalam pelaksanaan KUBE adalah manajemen program yang belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keterampilan anggota KUBE dalam mengelola usaha mereka, yang mengakibatkan gangguan dalam pelaksanaan program. Selain itu, masalah juga muncul dalam perencanaan usaha, dengan kelompok KUBE kesulitan dalam memilih jenis usaha yang memberikan keuntungan maksimal bagi anggotanya.

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Fahmi dkk (2021) juga menyoroti beberapa kendala dalam pelaksanaan program KUBE. Kendala yang disebutkan terkait dengan ketidakmampuan program ini memberikan keuntungan yang signifikan bagi anggotanya. Masalah dalam pembukuan juga menjadi permasalahan serius yang mengakibatkan ketidakteraturan dalam catatan pengeluaran dan pemasukan.

Penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas menunjukkan bahwa penelitian yang ada sebelumnya juga memiliki permasalahan yang hampir sama terkait pelaksanaan program KUBE. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan pelaksanaan program KUBE di Kecamatan Gadingrejo sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program KUBE yang telah atau sedang dilaksanakan sehingga dapat memberikan rekomendasi dan saran terkait pelaksanaan KUBE di Kecamatan Gadingrejo agar menjadi lebih baik.

Masih ditemukannya beberapa masalah dalam pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama Kecamatan Gadingrejo menunjukkan perlunya

tindakan nyata oleh semua pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama sesuai dengan tujuan awal pembentukannya yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu penting untuk mengetahui sejauh mana efektivitas, efisiensi, dan ketepatan program KUBE dalam memberikan bantuan usaha ekonomi produktif kepada kelompok usaha bersama untuk penanganan fakir miskin. Kemudian melakukan sebuah evaluasi guna melihat bagian mana saja yang kurang efektif dan efisien dalam proses pelaksanaan program ini. Dan yang terakhir adalah dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program KUBE.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dalam rangka mengevaluasi program KUBE di Kecamatan Gadingrejo, penulis akan menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Bridgman & Davis yang terdiri dari empat indikator yaitu *Input*, *Process*, *Outputs*, dan *Outcomes*. Lebih lanjut lagi penulis akan menuangkan ide tersebut kedalam sebuah penelitian dengan judul **“EVALUASI PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DI KECAMATAN GADINGREJO”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis dapat menuliskan rumusan masalah yaitu “Bagaimana Evaluasi Program KUBE di Kecamatan Gadingrejo?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Gadingrejo serta memberikan saran

dan masukan mengenai pelaksanaan program KUBE di masa yang akan datang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan di bidang akademik mengenai pelaksanaan program (KUBE).
2. Sebagai rujukan atau data pembanding untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

##### Manfaat Praktis

1. Mengetahui tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program (KUBE).
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program (KUBE).

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penelitian sebelumnya dimanfaatkan sebagai sumber informasi untuk membantu membentuk perspektif, juga untuk memahami perbedaan antara studi-studi yang ada dan faktor-faktor kunci lainnya yang dapat menjadi dasar untuk pengembangan pemahaman peneliti.

**Table 3. Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Relevansi Penelitian
1	Nugroho, dkk (2020)	Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Kota Batu	Penelitian ini berfokus untuk mengevaluasi pelaksanaan program KUBE di Kecamatan Kota Batu dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang terdiri dari enam indikator yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan.	Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini, karena pada penelitian tersebut lebih berfokus untuk mengevaluasi program KUBE melalui teori evaluasi kebijakan William N. Dunn.
2	Anggraini, dkk (2022)	Evaluasi Program E-Warong KUBE PKH Berdasarkan Permensos RI Nomor 8 Tahun 2017 Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bengkulu	Penelitian ini berfokus untuk membahas evaluasi program E-warong yang berdasarkan Permensos No 8 Tahun 2017.	Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu menggunakan teori evaluasi kebijakan Bridgman & Davis. Namun memiliki sedikit perbedaan yaitu fokus penelitian yang diteliti.

3	Fahmi, dkk (2021)	Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (Kube) Dalam Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Di Lingkungan Lopang Gede Kota Serang	Penelitian ini berfokus untuk mengevaluasi program KUBE dalam memberdayakan perempuan rawan sosial ekonomi ekonomi di Lingkungan Lopang Gede Kota Serang.	Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini, karena pada penelitian tersebut lebih berfokus mengevaluasi program KUBE dalam memberdayakan perempuan rawan sosial ekonomi
4	Qodrat, (2017)	Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (Kube) Dalam Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Di Lingkungan Lopang Gede Kota Serang	Penelitian ini berfokus untuk mengevaluasi pelaksanaan program KUBE di Kecamatan Kota Batu dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang terdiri dari enam indikator yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan.	Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini, karena pada penelitian tersebut lebih berfokus untuk mengevaluasi program KUBE melalui teori evaluasi kebijakan William N. Dunn.

---

Sumber: *Lafitra, 2017*

## 2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau suatu badan guna menyelesaikan masalah yang terjadi disekitarnya. Salah satu pengertian kebijakan publik adalah menurut Dye (1975), ia mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah apapun itu yang diambil oleh pemerintah untuk dilaksanakan dan tidak dilaksanakan. Pengertian tersebut dapat diartikan jika melakukan satu hal adalah keputusan, maka tidak melakukan apapun juga adalah sebuah keputusan. Dalam hal ini saat pemerintah dapat membuat sebuah perintah yang dapat menyelesaikan masalah disekitarnya maka hal tersebut dapat dikatakan

sebuah kebijakan. Sebaliknya jika pemerintah memilih diam terhadap permasalahan di sekitarnya maka hal itu juga termasuk kebijakan.

Menurut Laswell dan Kaplan dalam Taufiqurokhman (2014), kebijakan publik harus mencakup tujuan, nilai, dan praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Ini berarti bahwa kebijakan publik tidak boleh berlawanan dengan nilai dan praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Jika suatu kebijakan publik mengandung nilai yang ada dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mampu mendapat atensi dan resistensi ketika diimplementasikan. Sebaliknya, jika kebijakan publik berlawanan dengan nilai dan praktik sosial yang ada dalam masyarakat maka kebijakan tersebut tidak akan bertahan lama. Dalam hal ini sudah menjadi suatu kelayakan saat kebijakan publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Menurut Anggara (2018), kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang diterbitkan oleh badan dan pejabat pemerintah yang saling terkait. Kebijakan publik berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk melanjutkan tindakan yang akan dilakukan. Kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh pemegang otoritas publik yang mengikat banyak orang. Kebijakan publik harus dibuat oleh pemegang mandat yang diberikan oleh publik karena memiliki perwakilan atas banyak orang.

Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu untuk melakukan kegiatan tertentu atau mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak (Peraturan Menpan RB No. Per/4/M.PAN/4/2007).

Dari berbagai definisi kebijakan publik di atas dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan atau tindakan bersama yang dibuat oleh pemegang kekuasaan (badan atau pemerintah) yang ditujukan untuk

kepentingan umum dengan terlebih dahulu menimbang yang baik dan yang buruk serta dampak yang ditimbulkan sebelum diimplementasikan pada masyarakat.

### **2.3 Konsep Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi merupakan langkah penting dalam keseluruhan proses analisis kebijakan publik, yang dilakukan tidak hanya pada tahap akhir namun juga pada keseluruhan proses kebijakan. Evaluasi dilakukan sebab tidak seluruh program kebijakan publik mencapai hasil yang diinginkan. Evaluasi menurut Mustopadidjaja merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu program kebijakan publik. Menurut Winarno (2008), evaluasi kebijakan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang berkaitan dengan penilaian atau evaluasi kebijakan termasuk isi, pelaksanaan dan dampaknya. Sedangkan menurut Behn (2020) evaluasi biasanya menuntut stabilitas program untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna mengukur perilaku dan hasil dari waktu ke waktu. Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah suatu proses atau kegiatan perbandingan yang bertujuan untuk menentukan nilai berdasarkan standar tertentu untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan sejak awal.

Secara umum evaluasi kebijakan bertujuan apakah suatu kebijakan sudah berjalan sesuai dengan rencana atau belum. Tujuan dari evaluasi kebijakan menurut Subarsono (Akbar, 2018) adalah:

- a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan, sehingga dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
- b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan, dengan evaluasi juga dapat mengungkapkan berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
- c. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan, yaitu mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau *output* dari suatu kebijakan.

- d. Mengukur dampak suatu kebijakan, baik positif atau negatif, dengan melihat dampak dari suatu kebijakan pada tahap lebih lanjut.
- e. Mengetahui apabila terjadi penyimpangan, dengan membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
- f. Memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

#### **2.4 Pendekatan Evaluasi Kebijakan**

Menurut Dunn (Debby, 2015) pendekatan dalam evaluasi kebijakan dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Evaluasi Semu (*Pseudo Evaluation*) adalah suatu pendekatan evaluasi kebijakan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tanpa mempertanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Dalam evaluasi semu, analis menerapkan berbagai metode seperti rancangan eksperimental-semu, kuesioner, random sampling, dan teknik statistik untuk menjelaskan beberapa hasil kebijakan sebagai *output* dari variabel masukan proses.
- b. Evaluasi Formal (*Formal Evaluation*) adalah suatu pendekatan evaluasi kebijakan yang menggunakan metode deskriptif untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya tentang hasil-hasil kebijakan. Meskipun demikian, penilaian ini dilakukan berdasarkan tujuan program yang telah secara resmi diumumkan oleh perancang kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan sasaran yang diumumkan secara resmi ini adalah ukuran yang tepat untuk mengukur manfaat atau nilai dari kebijakan program tersebut.

- c. Evaluasi keputusan teoritis (*Decision Theoretic Evaluation*) adalah suatu pendekatan evaluasi kebijakan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan akurat mengenai hasil-hasil kebijakan yang dievaluasi secara eksplisit oleh berbagai pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Asumsi dari evaluasi keputusan teoritis adalah bahwa tujuan perilaku kebijakan, baik yang diungkapkan secara formal maupun yang tersirat, merupakan ukuran yang layak untuk menilai manfaat atau nilai dari kebijakan dan program tersebut.

Pendekatan evaluasi kebijakan yang telah disebutkan diatas memberikan pengertian bahwa dalam proses evaluasi kebijakan terdapat berbagai macam pendekatan yang dilakukan guna memperoleh data yang diinginkan dengan maksimal. Namun, pada proses pelaksanaannya evaluasi kebijakan juga dapat mengikuti format standar, artinya proses evaluasi dapat disesuaikan dengan standar yang ada di lapangan. Tunc dalam Bridgman & Davis (2020) menyarankan pendekatan dalam melakukan evaluasi adalah sebagai berikut:

- a. Pahami program dan asumsinya.
- b. Mengembangkan tujuan evaluasi.
- c. Rancangan rencana evaluasi.
- d. Mengumpulkan dan menilai informasi dan data.
- e. Laporkan hasil.
- f. Integrasikan temuan.

Anderson (Nuryanti, 2015) membagi evaluasi kebijakan menjadi tiga tipe, tipe evaluasi yang dikemukakan ini berdasarkan pada pengetahuan evaluator terhadap evaluasi:

- a. Evaluasi kebijakan sebagai kegiatan fungsional, pada tipe ini evaluasi kebijakan dianggap sebagai suatu kegiatan yang sama tingkatnya dengan kebijakan itu sendiri.

- b. Evaluasi kebijakan yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan, pada tipe ini evaluasi membahas mengenai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program serta mengenai kejujuran.
- c. Evaluasi kebijakan sistematis, pada tipe ini evaluasi kebijakan melihat secara langsung program kebijakan yang dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana kebijakan tersebut berdampak ke masyarakat dan seberapa berhasilnya pelaksanaan tersebut dari tujuan yang telah direncanakan pada awal pembuatan kebijakan.

Lebih lanjut mengenai tipe evaluasi kebijakan, Bridgman & Davis (2020) juga mengidentifikasi empat jenis evaluasi kebijakan adalah sebagai berikut:

- a. Evaluasi kesesuaian, membantu pengambil keputusan untuk menentukan apakah program baru diperlukan, atau apakah program yang sudah ada sebaiknya dipertahankan.
- b. Evaluasi efisiensi, memeriksa seberapa baik masukan digunakan untuk memperoleh luaran tertentu. Apakah program tersebut telah efisien dalam menggunakan anggaran untuk tujuan implementasi kebijakan.
- c. Evaluasi efektivitas, membahas mengenai apakah program ini memberikan hasil yang bermanfaat. Apakah hasilnya sepadan dengan biayanya atau apakah program tersebut mencapai tujuannya.
- d. Meta evaluasi, secara sistematis menggabungkan beberapa evaluasi untuk mencapai perbaikan pada keseluruhan pengetahuan tentang suatu topik.

## **2.5 Metode Evaluasi Kebijakan**

Secara lebih mendalam, dalam bukunya yang berjudul *The Australian Policy Handbook*, Bridgman & Davis (2020) menyampaikan langkah-langkah yang diterapkan dalam proses evaluasi kebijakan adalah sebagai

berikut

- a. Mendefinisikan kebijakan tujuan dan hasil yang diharapkan
- b. Mendefinisikan audiens untuk evaluasi
- c. Mengidentifikasi tujuan evaluasi dan pertanyaan penelitian
- d. Memilih pendekatan evaluasi
- e. Mengidentifikasi data persyaratan
- f. Mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan dan pemerintahan pengaturan
- g. Melakukan evaluasi
- h. Melakukan evaluasi (Lanjutan)
- i. Menggunakan dan menyebarkan temuan evaluasi

## 2.6 Indikator Evaluasi Kebijakan

Kinerja pelaksanaan kebijakan publik harus dinilai untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan berhasil tercapai. Hal tersebut untuk menilai apakah pelaksanaan suatu kebijakan telah sesuai dengan rencana awal pembuatan kebijakan. Bridgman & Davis (2020) mengungkapkan terdapat empat indikator utama dalam proses evaluasi kebijakan, yaitu:

- a. Indikator *input*, berkaitan dengan sumber daya yang digunakan dalam implementasi kebijakan, seperti anggaran, tenaga kerja, dan infrastruktur.
- b. Indikator *process*, berkaitan dengan proses implementasi kebijakan, seperti perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan.
- c. Indikator *outputs*, berkaitan dengan hasil yang dihasilkan dari implementasi kebijakan, seperti produk, layanan, dan kebijakan yang dihasilkan.
- d. Indikator *outcomes*, berkaitan dengan dampak yang dihasilkan dari implementasi kebijakan, seperti perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Keempat indikator evaluasi kebijakan tersebut digunakan untuk mengukur kinerja dan dampak kebijakan publik yang telah diimplementasikan. Evaluasi kebijakan yang baik harus mempertimbangkan keempat indikator ini secara seimbang dan menyeluruh agar didapat hasil yang diinginkan dari proses evaluasi kebijakan itu sendiri.

**Table 4. Teori Evaluasi Kebijakan Bridgman & Davis**

No	Indikator	Fokus Penilaian
1	<i>Input</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan?</li> <li>2. Berapakah SDM (sumber daya), uang atau infrastruktur pendukung lain yang diperlukan?</li> </ol>
2	<i>Process</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat?</li> <li>2. Bagaimanakah efektivitas dan efisiensi dari metode/cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut?</li> </ol>
3	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah hasil atau produk yang dihasilkan sebuah kebijakan publik?</li> <li>2. Berapa orang yang berhasil mengikuti program / kebijakan tersebut?</li> </ol>
4	<i>Outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan?</li> <li>2. Berapa banyak dampak positif yang dihasilkan?</li> <li>3. Adakah dampak negatifnya? seberapa seriuskah?</li> </ol>

Sumber: *Lafitra, 2017*

Untuk menilai program atau kebijakan publik, diperlukan adanya kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilannya. Terkait dengan evaluasi kinerja kebijakan dan pengumpulan informasi, Dunn dalam Lafitra 2017 mengidentifikasi sejumlah kriteria evaluasi sebagai berikut:

**Table 5. Teori Evaluasi Kebijakan William N. Dunn**

No	Indikator	Fokus Penilaian
1	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
2	Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
3	Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
4	Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?
5	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
6	Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Sumber: *Lafitra, 2017*

### **2.7 Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)**

Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan inisiatif pemberdayaan masyarakat miskin yang diinisiasi oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial, kemudian diimplementasikan di tingkat daerah oleh Dinas Sosial. Program ini bertujuan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan pendekatan kelompok. Sasaran utamanya adalah meningkatkan produktivitas kelompok usaha, menyediakan sebagian kebutuhan bagi keluarga yang kurang mampu, menciptakan keharmonisan hubungan sosial di antara warga, menyelesaikan masalah sosial yang dihadapi keluarga kurang mampu, serta memberikan wadah bagi pengembangan diri dan berbagi pengalaman antar anggota kelompok. Pendekatan melalui KUBE mencerminkan identitas Kementerian Sosial dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan panduan umum pelaksanaan program pemberdayaan sosial Departemen Sosial RI tahun

2009, pendekatan KUBE dianggap sebagai metode yang efektif dalam melakukan pemberdayaan sosial terhadap masyarakat miskin dengan alasan:

*Pertama*, dengan sistem KUBE kegiatan usaha yang tadinya dilakukan secara sendiri-sendiri kemudian dikembangkan dalam kelompok, sehingga akan memudahkan dalam pembinaan dan monitoring serta pembinaannya akan lebih efektif dan efisien baik dari segi biaya, tenaga, dan waktu yang digunakan. *Kedua*, dengan pembinaan melalui KUBE diharapkan kelompok ini akan saling membantu satu sama lain antara yang lemah dengan yang lebih mampu, baik dalam kemampuan, keterampilan, modal dan lain-lain yang terkait dengan kegiatan KUBE. *Ketiga*, diharapkan dengan KUBE dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan, rasa kepedulian, dan kesetiakawanan sosial, baik antar warga binaan sosial maupun kepada masyarakat secara luas karena mereka hidup dalam kelompok dan *Keempat*, KUBE dapat berfungsi menggerakkan keswadayaan, menguatkan dan mengembangkan usaha anggota, wadah pembinaan sosial, ekonomi dan budaya

### **2.7.1 Definisi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)**

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah suatu kelompok yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas dasar yang sama yaitu melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga (Permensos No.2 Tahun 2019). Menurut Kementerian RI, KUBE merupakan media untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan anggotanya dalam mengelola usaha ekonomi produktif. KUBE juga dianggap sebagai sarana dalam meningkatkan usaha ekonomi produktif, khususnya dalam peningkatan pendapatan dan memotivasi warga miskin untuk lebih mandiri dalam mengatasi kemiskinan.

Kemudian Menurut Sumodiningrat (2009), mendefinisikan KUBE sebagai sebuah kelompok warga atau keluarga yang dibentuk oleh individu atau keluarga yang telah mendapatkan bimbingan melalui upaya pemberdayaan, dengan tujuan untuk menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi. KUBE dikelola oleh 5-20 orang yang tinggal berdekatan dan berdomisili tetap, dan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat. KUBE juga mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam bentuk bantuan tunai melalui transfer ke rekening kelompok.

### **2.7.2 Tujuan dan Sasaran Pembentukan KUBE**

Tujuan dari Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah untuk mempercepat penghapusan kemiskinan melalui peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama dalam kelompok, peningkatan pendapatan, pengembangan usaha, dan peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial di antara para anggota KUBE dan dengan masyarakat sekitar. Sasaran dari program KUBE di Kabupaten Pringsewu adalah keluarga fakir miskin, terpecil, individu atau kelompok yang memiliki usaha atau mempunyai kemauan dalam pembentukan usaha bersama, individu atau kelompok yang memiliki keterbatasan akses pasar, modal dan usaha serta harus masuk ke dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFOTM).

### **2.7.3 Proses Pembentukan KUBE**

Proses pembentukan KUBE tidak lepas dari berbagai pola koordinasi berbagai pihak. Berikut adalah proses pembentukan KUBE berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 2 Tahun 2019:

1. Kriteria Pembentukan KUBE:
  - a. KUBE harus memiliki potensi, kemauan, dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama.
  - b. Anggota KUBE harus memiliki jenis usaha dan tinggal di wilayah desa/kelurahan/nama lain dalam kecamatan yang sama.
  - c. KUBE harus memiliki keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha.
  - d. Jumlah anggota KUBE minimal 5 (lima) kepala keluarga dan maksimal 20 (dua puluh) kepala keluarga.
  
2. Pengurus KUBE:
  - a. Ketua
  - b. Sekretaris
  - c. Bendahara
  - d. Anggota
  
3. Kriteria Anggota KUBE:
  - a. Kepala keluarga dan/atau pencari nafkah utama dalam keluarga.
  - b. Berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan masih produktif.
  - c. Berdomisili tetap dan memiliki identitas diri.
  - d. Memiliki potensi dan keterampilan.
  
4. Pembentukan KUBE:
  - a. Kelompok masyarakat mengajukan pembentukan KUBE kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota.
  - b. Dinas sosial daerah melakukan verifikasi dan validasi berdasarkan data terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu.
  - c. Dinas sosial daerah mengusulkan calon KUBE berdasarkan hasil verifikasi dan validasi kepada Menteri Sosial c.q

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin atau unit kerja eselon II yang menangani KUBE.

## 2.8 Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah alur pemikiran yang digunakan oleh penulis, baik yang dikembangkan sendiri maupun diambil dari teori yang relevan, untuk mengatasi masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan evaluasi terhadap program KUBE di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis merujuk kepada teori evaluasi yang diperkenalkan oleh Bridgman & Davis. Teori ini mencakup empat kriteria atau indikator untuk mengevaluasi hasil kebijakan, yakni *input, proses, outputs, dan outcomes*. Dengan menggunakan empat indikator tersebut, peneliti akan mengevaluasi implementasi Program KUBE di Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan Program KUBE di lapangan sesuai dengan realitasnya. Untuk mengumpulkan data dan informasi terkait implementasi program KUBE, penulis melakukan observasi dan wawancara dengan berbagai pihak, termasuk petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, Pendamping Sosial Masyarakat, Ketua dan Anggota KUBE, serta masyarakat secara umum.

Permasalahan yang ada dilapangan adalah:

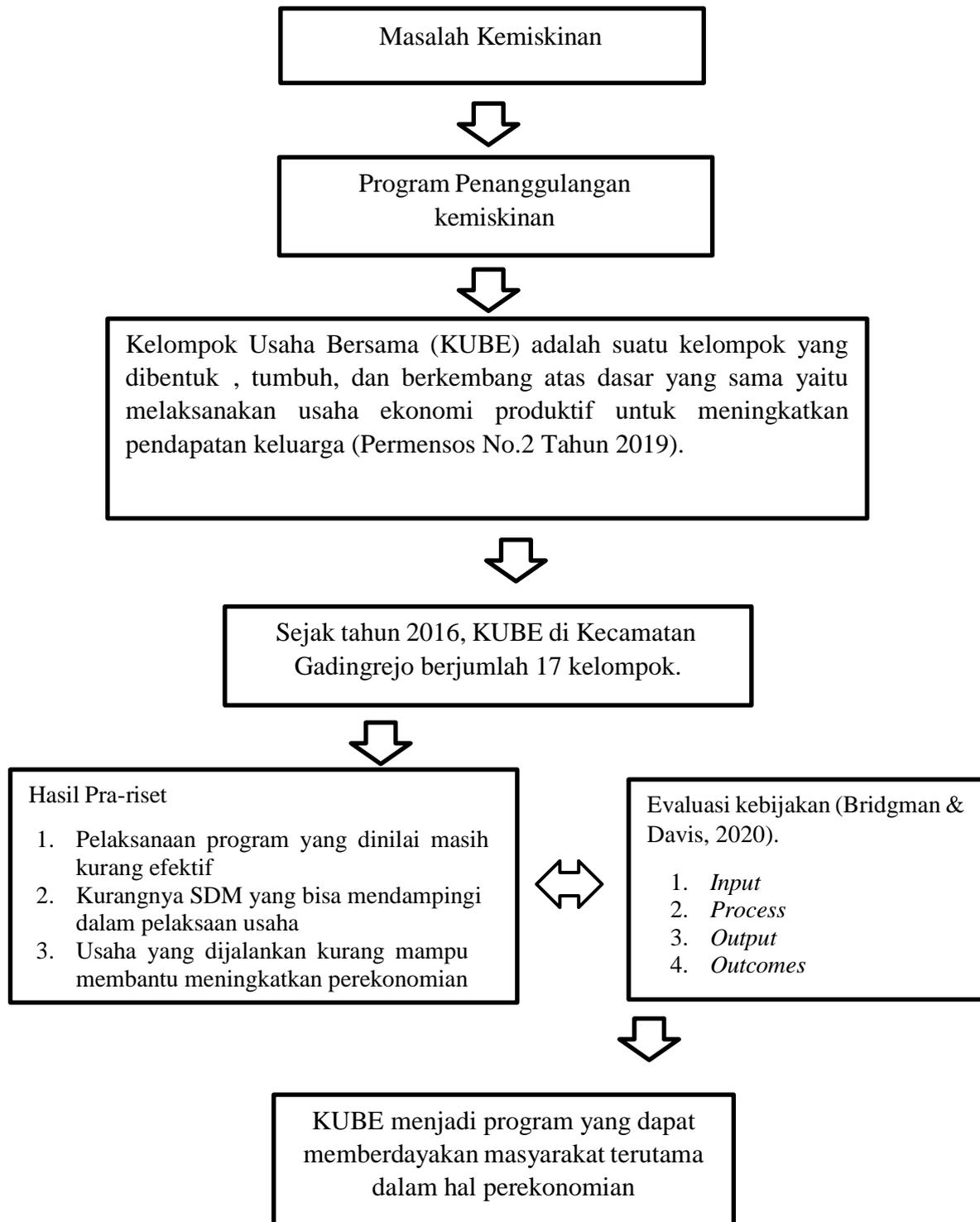
- a. Pelaksanaan program yang dinilai masih kurang efektif
- b. Kurangnya SDM yang bisa mendampingi dalam pelaksanaan usaha
- c. Usaha yang dijalani kurang mampu membantu meningkatkan perekonomian

Berdasarkan permasalahan diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan dari program KUBE masih belum efektif membantu perekonomian masyarakat. Padahal pada tujuan awal pembentukan KUBE adalah untuk mempercepat

penghapusan kemiskinan melalui peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama dalam kelompok, peningkatan pendapatan, pengembangan usaha, dan peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial di antara para anggota KUBE dan dengan masyarakat sekitar. Berangkat dari permasalahan diatas, penulis menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Bridgman & Davis (2020) yang terdiri dari empat indikator, yaitu:

- a. Indikator *input*, berkaitan dengan sumber daya yang digunakan dalam implementasi kebijakan, seperti anggaran, tenaga kerja, dan infrastruktur.
- b. Indikator *process*, berkaitan dengan proses implementasi kebijakan, seperti perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan.
- c. Indikator *outputs*, berkaitan dengan hasil yang dihasilkan dari implementasi kebijakan, seperti produk, layanan, dan kebijakan yang dihasilkan.
- d. Indikator *outcomes*, berkaitan dengan dampak yang dihasilkan dari implementasi kebijakan, seperti perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Indikator evaluasi yang dikemukakan oleh Bridgman & Davis dinilai lebih tepat dan rasional untuk menjawab permasalahan yang terjadi mengenai pelaksanaan KUBE di Kecamatan Gadingrejo.



**Gambar 1. Kerangka Pikir**

*Sumber: Diolah Peneliti*

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dalam bentuk penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menguraikan atau menjelaskan fenomena atau peristiwa secara terstruktur. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip dalam Moleong (2017), metode kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan yang berasal dari partisipan serta perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini didasarkan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk menginvestigasi objek dalam konteks alamiah (berbeda dengan eksperimen), dengan peneliti bertindak sebagai instrumen utama. Metode pengumpulan data melibatkan triangulasi, yaitu penggunaan berbagai teknik pengumpulan data, dan analisis data bersifat induktif dan kualitatif.

#### **3.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah untuk menilai mengevaluasi pelaksanaan program KUBE di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dengan merujuk kepada teori evaluasi kebijakan Bridgman & Davis (2020) yang mencakup empat indikator, yakni:

- a. Indikator *input*, berkaitan dengan sumber daya yang digunakan dalam implementasi program KUBE di Kecamatan Gadingrejo, seperti anggaran, tenaga kerja, dan infrastruktur.
- b. Indikator *process*, berkaitan dengan proses implementasi program KUBE di Kecamatan Gadingrejo, seperti perencanaan dan koordinasi.

- c. Indikator *outputs*, berkaitan dengan hasil yang dihasilkan dari implementasi program KUBE di Kecamatan Gadingrejo seperti produk, layanan, dan kebijakan yang dihasilkan.
- d. Indikator *outcomes*, berkaitan dengan dampak yang dihasilkan dari implementasi kebijakan program KUBE di Kecamatan Gadingrejo, seperti perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, yang telah menjadi lokasi penerapan program KUBE. Lebih khususnya, lokasi penelitian bertempat di beberapa pekon di Kecamatan Gadingrejo yaitu Tambakrejo (KUBE Tambah Barokah), Wonosari (KUBE Berkah Sejahtera), Klaten (Matahari), Wonodadi Utara (KUBE Manunggal), dan Yogyakarta (KUBE Jogja Jaya). Penulis memilih lokasi ini karena Kecamatan Gadingrejo memperlihatkan tingkat kemiskinan yang signifikan di antara kecamatan-kecamatan di Kabupaten Pringsewu. Hal ini menjadikan program pengentasan kemiskinan seharusnya sangat relevan dengan kondisi yang ada saat ini.

### **3.4 Sumber Data**

Menurut Lofland, seperti yang dijelaskan dalam Moleong (2017), sumber utama data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sedangkan yang lainnya termasuk data tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan data menjadi dua jenis:

- a. Data Primer, Data primer digunakan untuk mendapatkan informasi yang akurat. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan, baik melalui pengamatan langsung maupun melalui interaksi dengan informan. Untuk mengumpulkan data primer,

penelitian melibatkan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang akan dibahas.

- b. Data Sekunder, Data sekunder digunakan untuk melengkapi informasi yang telah diperoleh dari sumber data primer. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder dapat berupa catatan tertulis, peraturan hukum, panduan pelaksanaan, literatur, artikel, berita koran, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan Program KUBE.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan pada penelitian kali ini ada dua, yaitu:

- a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data-data primer yang berhubungan dengan fokus penelitian. Pada penelitian ini, penulis mewawancarai informan yang berkaitan dengan program KUBE. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan mendalam mengenai fokus penelitian.

**Table 6. Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan	Informasi yang diperoleh
1	Dedy Akhmadi, S.Pt., M.IP	Kasi Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu	Mengetahui perkembangan KUBE dari tahun ke tahun di Kecamatan Gadingrejo
2	Agus Edi Subowo	TKSK Kecamatan Gadingrejo	Memberikan informasi mengenai pelaksanaan KUBE secara garis besar di Kecamatan Gadingrejo
3	Yudianto	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Pekon Jogjakarta	Memberikan informasi mengenai pelaksanaan KUBE secara garis besar di pekon yang didampingi
4	Suherpriono	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Pekon Wates	Memberikan informasi mengenai pelaksanaan KUBE secara garis besar di pekon yang didampingi
5	Harpania	Ketua KUBE Tambah Barokah	Memberikan gambaran secara langsung tentang usaha yang dijalani oleh kelompoknya
6	Sri Lestari	Ketua KUBE Berkah Sejahtera	Memberikan gambaran secara langsung tentang usaha yang dijalani oleh kelompoknya
7	Yeni Afrina	Ketua KUBE Matahari	Memberikan gambaran secara langsung tentang usaha yang dijalani oleh kelompoknya
8	Siti Maesaroh	Ketua KUBE Manunggal	Memberikan gambaran secara langsung tentang usaha yang dijalani oleh kelompoknya
9	Suwanti	Ketua KUBE Jogja Jaya	Memberikan gambaran secara langsung tentang usaha yang dijalani oleh kelompoknya

*Sumber:* Diolah Peneliti, 2024

#### b. Observasi

Nasution dalam Sugiyono (2017) mendefinisikan observasi atau pengamatan sebagai proses fokus terhadap gejala, peristiwa, atau objek tertentu. Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data primer dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Pada penelitian ini observasi yang dilakukan penulis adalah dengan melihat atau mengamati secara langsung objek penelitian. Dalam hal ini objek penelitian yang dimaksud adalah kelompok KUBE. Pengamatan dapat berupa melihat

bagaimana bentuk usaha yang dijalankan atau tempat berjalannya usaha.

c. Dokumentasi

Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa dokumen adalah catatan tentang peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, dan dokumen dapat berbentuk teks tertulis, gambar, atau karya monumental dari individu tertentu. Penggunaan studi dokumen adalah sebagai pelengkap bagi metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

**Table 7. Dokumentasi Penelitian**

No.	Nama Dokumen	Substansi Dokumen
1	Peraturan Menteri Sosial No. 2 Tahun 2019	Tentang bantuan sosial usaha ekonomi produktif kepada kelompok usaha bersama untuk penanganan fakir miskin
2	KUBE Kecamatan Gadingrejo	Jumlah KUBE yang ada di Kecamatan Gadingrejo
3	Laporan penyaluran bantuan Kab. Pringsewu	Data penerima bantuan Kecamatan Gadingrejo dan data penduduk miskin di Kecamatan Gadingrejo
4	Laporan keuangan KUBE	Dokumentasi mengenai apa saja yang telah dilakukan selama berjalannya KUBE tersebut
5	Gadingrejo dalam angka	Dokumentasi mengenai gambaran umum Kecamatan Gadingrejo

*Sumber:* Diolah Peneliti, 2024

### 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif terjadi selama pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam jangka waktu tertentu. Miles dan Huberman, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2017), mengemukakan bahwa analisis data kualitatif adalah proses

interaktif yang berkelanjutan hingga data dianggap cukup. Berikut adalah tahapan atau kegiatan yang dilakukan dalam proses analisis data.

a. Reduksi Data

Data yang dikumpulkan dari lapangan dapat berjumlah besar, oleh karena itu, perlu dicatat dengan teliti dan secara mendetail. Proses pengurangan data mengimplikasikan pengkompresian, pemilihan elemen-elemen kunci, pemfokusan pada aspek-aspek penting, serta pencarian tema dan pola yang signifikan.

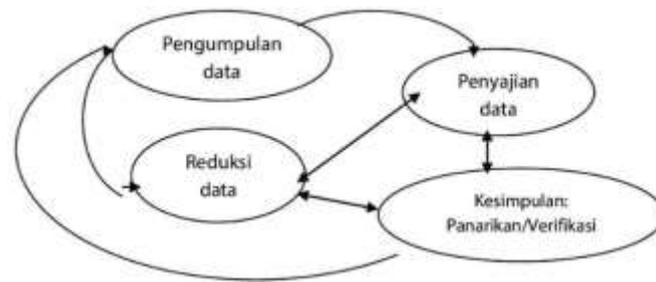
b. Penyajian Data

Penyajian data adalah rangkuman informasi yang memberikan kesempatan kepada peneliti untuk membuat kesimpulan dan mengambil tindakan. Biasanya, penyajian data terwujud dalam bentuk narasi yang disertai dengan gambar, grafik, atau tabel guna memvisualisasikan analisis secara jelas, terperinci, dan mudah dipahami. Tujuannya adalah untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan penelitian melalui proses analisis data.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tindakan verifikasi yang berlangsung secara berkelanjutan sepanjang seluruh proses penelitian, dimulai dari tahap awal saat memasuki lokasi penelitian hingga proses pengumpulan data. Aktivitas ini merupakan bagian dari analisis data yang bertujuan untuk menemukan makna dan membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah terhimpun, dengan mencari pola, tema, hubungan, kesamaan, dan hipotesis kerja.

Berikut adalah bagan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (1984).



**Gambar 1. Komponen Dalam Analisis Data (interactive model)**

*Sumber: (Sugiyono, 2017)*

### 3.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah ukuran validitas data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Menurut Moleong (2017), untuk menilai keabsahan data dalam penelitian kualitatif, harus mematuhi sejumlah persyaratan, termasuk dalam proses pemeriksaan data dan penggunaan kriteria:

a. Tingkat Kepercayaan

1. Triangulasi

Dalam konteks teknik keabsahan data, triangulasi adalah metode pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik dan sumber data yang sudah ada. Menurut Mathinson, seperti yang dijelaskan dalam Sugiyono (2017), nilai dari pengumpulan data dengan menggunakan triangulasi adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang data, serta untuk mengidentifikasi ketidakkonsistenan atau kontradiksi dalam data yang diperoleh.

2. Perpanjangan waktu penelitian

Pengulangan waktu pengamatan dilakukan dengan maksud untuk mengumpulkan data yang lebih mendalam mengenai permasalahan atau isu yang tengah diselidiki. Melalui perpanjangan waktu pengamatan, peneliti memiliki kesempatan untuk memberikan deskripsi data yang lebih tepat

dan terstruktur tentang apa yang sedang diamati. Berdasarkan hal tersebut, lama waktu penelitian yang peneliti gunakan adalah selama lima bulan terhitung sejak bulan Januari – Mei 2024.

b. Keteralihan

Pengujian keteralihan dalam penelitian kualitatif bertujuan agar orang lain dapat memahami temuan penelitian kualitatif tersebut dengan baik dan memungkinkan penerapan hasil penelitian. Oleh karena itu, saat membuat laporan, penulis harus menyajikan informasi yang terperinci, jelas, terstruktur, dan dapat diandalkan.

c. Kepastian

Kepastian data adalah pengujian hasil penelitian dengan mengaitkannya secara konsisten dengan langkah-langkah yang telah diambil dalam penelitian tersebut. Tujuannya adalah untuk memverifikasi bahwa hasil yang dicapai merupakan hasil yang sejalan dengan proses penelitian yang telah dilakukan. Untuk menjalankan pengujian ini, dilakukan seminar proposal dan seminar hasil dengan mengundang rekan sejawat, dosen pembimbing, serta dosen penguji.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

#### a) *Input*

##### 1. Anggaran:

Evaluasi terhadap program KUBE menunjukkan bahwa sumber dana berasal dari APBN dan APBD, masing-masing senilai 20 juta rupiah dan 10 juta rupiah, hal tersebut mempengaruhi jenis usaha yang dijalankan. KUBE APBN cenderung menjalankan toko sembako dan menyalurkan bantuan sosial, sedangkan KUBE APBD bergerak di bidang jasa. Meskipun bantuan berupa dana hibah dianggap cukup, ada perbedaan fleksibilitas penggunaan dana, dengan APBN lebih fleksibel tetapi berisiko pada pengawasan, dan APBD lebih mudah diawasi tetapi kurang fleksibel serta cenderung berumur pendek karena tingginya persaingan dan dampak pandemi. Selain itu, pada KUBE dengan skema APBD adanya masalah yang ditemukan dalam manajemen keuangan dan pengawasan, terutama pada bantuan barang yang tidak sesuai dengan nilai dana yang dialokasikan. KUBE APBN juga menghadapi tantangan dalam bersaing dan menurun aktivitasnya akibat berakhirnya peran sebagai agen penyalur PKH Non-Tunai.

##### 2. Sumber Daya Manusia:

Evaluasi pada program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tenaga kerja utama terdiri dari masyarakat miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Meskipun program ini bertujuan untuk

mengentaskan kemiskinan, beberapa hambatan mengganggu kontribusi optimal tenaga kerja. Hambatan ini meliputi kurangnya kedisiplinan, keterampilan manajerial, dan pemahaman dalam manajemen keuangan. Selain itu, minimnya pendampingan dari Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) menghambat pengembangan usaha KUBE. Kekurangan dalam pendampingan dan sumber daya manusia yang memadai berdampak negatif pada keberhasilan program ini. Meskipun tenaga kerja KUBE sudah sesuai sasaran, keberhasilan program masih terhambat oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang perlu segera diatasi.

### 3. Infrastruktur:

Evaluasi pada program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang telah dilakukan menunjukkan bahwa perbedaan signifikan dalam aspek infrastruktur antara yang didanai oleh APBD dan APBN. KUBE dengan dana APBD mendapat bantuan barang senilai 10 juta rupiah dari pemerintah daerah, memberikan fleksibilitas dalam penggunaan sesuai kebutuhan usaha. Sementara itu, KUBE yang didanai APBN menerima mesin gesek dari Kementerian Sosial dan bantuan uang tunai 20 juta rupiah, yang penting untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan pembelian peralatan usaha. Namun, kurangnya dukungan dan pengetahuan teknis menyebabkan mesin EDC rusak dan tidak optimal digunakan. Temuan yang ada menunjukkan bahwa dukungan teknologi dan pelatihan yang memadai sangat penting untuk keberhasilan kebijakan ini. Infrastruktur yang baik dan pelatihan yang cukup diperlukan agar bantuan dapat dimanfaatkan secara optimal, meminimalkan kendala di masa depan.

**b) *Process***

## 1. Koordinasi:

Temuan yang ada pada tahap ini menunjukkan bahwa koordinasi antar-level pemerintahan dalam implementasi program KUBE sangat penting untuk keberhasilan dan keberlanjutan program. Temuan lapangan menunjukkan bahwa meskipun terdapat koordinasi yang baik pada tahap perencanaan dan penyaluran bantuan, namun sering kali terjadi ketidakberlanjutan dalam pendampingan dan monitoring pasca-penyaluran. Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif mengakibatkan banyak kelompok usaha tidak mendapatkan bimbingan yang cukup, menyebabkan stagnasi atau bahkan ketidakaktifan usaha mereka. Temuan yang ada pada penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa evaluasi program KUBE belum dilakukan secara berkala dan intensif, sehingga masalah yang timbul tidak terdeteksi dan ditangani dengan cepat. Untuk meningkatkan efektivitas Program KUBE, diperlukan upaya untuk meningkatkan koordinasi yang berkelanjutan dari tahap perencanaan hingga monitoring dan evaluasi, serta memastikan keterlibatan aktif semua pihak terkait seperti PSM, Dinas Sosial, dan pemerintah daerah dalam mendukung kelompok usaha secara optimal.

## 2. Perencanaan:

Proses perencanaan program KUBE berjalan baik, mulai dari diskusi dengan calon KPM hingga koordinasi dengan tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Ini menunjukkan alur yang jelas dan terkoordinasi dalam mengimplementasikan program. Keterlibatan antar-level pemerintahan dalam proses pengajuan dan persetujuan juga mencerminkan prinsip-prinsip koordinasi yang efektif.

**c) *Output***

Dalam evaluasi program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), temuan yang ada menunjukkan bahwa program ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial dengan mendorong masyarakat untuk mandiri melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang dijalankan bersama dalam kelompok. Meskipun KUBE memberikan insentif yang bervariasi, seperti bantuan barang atau uang tunai, serta tambahan pendapatan melalui Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), pandemi COVID-19 telah signifikan mempengaruhi aktivitas dan keberlanjutan usaha kelompok. Temuan lapangan menunjukkan bahwa banyak kelompok usaha mengalami penurunan aktivitas ekonomi karena penurunan permintaan dan gangguan rantai pasok. Meskipun demikian, program KUBE tetap memiliki dampak positif dengan meningkatkan pendapatan bagi anggota aktif, meskipun jumlah kelompok yang aktif masih tergolong sedikit dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di wilayah tertentu. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam manajemen dan dukungan terhadap kelompok-kelompok pasif atau tidak aktif untuk meningkatkan efektivitas program secara keseluruhan dalam mencapai tujuan pengentasan kemiskinan

**d) *Outcomes***

*Outcomes* menjadi fokus utama untuk mengukur dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat sasaran. Program ini bertujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota kelompok usaha serta mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah melalui pengembangan keterampilan, kapasitas manajerial, dan jaringan kerjasama. Hasil penelitian lapangan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pendapatan anggota kelompok setelah terlibat dalam KUBE, meskipun tidak semua anggota aktif merasakan dampak tersebut. Kendala terbesar meliputi kurangnya pendampingan, infrastruktur yang kurang memadai, serta kondisi sosial-ekonomi daerah yang beragam, yang

mempengaruhi keberhasilan program secara keseluruhan. Pengalihan bantuan dari Program Keluarga Harapan Non Tunai (BPNT) juga memberikan dampak negatif terhadap pendapatan KUBE. Pandemi COVID-19 juga menjadi tantangan serius dalam menjaga keberlanjutan usaha dan pendapatan kelompok selama krisis. Meskipun demikian, KUBE memberikan dampak positif tidak hanya bagi anggota kelompok, tetapi juga bagi masyarakat sekitarnya melalui berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi lokal.

## 5.2 Saran

### a) *Input*

1. Pemantauan secara menyeluruh terhadap bantuan yang diberikan Pemerintah perlu memastikan bahwa alokasi anggaran KUBE dari APBN dan APBD disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi ekonomi setempat. Selain itu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi rutin untuk memastikan dana digunakan secara efisien dan efektif.
2. Pelatihan bagi para aktor terkait Program pelatihan manajerial dan keuangan harus ditingkatkan bagi anggota KUBE untuk mengatasi kendala kurangnya keterampilan. Pelatihan yang berkelanjutan dan relevan dapat meningkatkan kemampuan anggota dalam mengelola usaha mereka.
3. Pendampingan intensif Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) perlu lebih aktif dalam memberikan pendampingan dan bimbingan. Penyediaan panduan, dukungan teknis, dan bantuan dalam menghadapi masalah operasional sangat penting untuk meningkatkan kinerja KUBE.
4. Pemberian sanksi Pemberian sanksi diberikan apabila terdapat kelompok yang kurang bertanggung jawab terhadap bantuan yang diberikan. Hal tersebut

bertujuan untuk menjadikan kelompok yang diberi bantuan agar lebih serius dalam mengelola bantuan.

**b) *Process***

1. Koordinasi yang berkelanjutan

Memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat untuk memastikan bahwa program KUBE berjalan sesuai rencana. Pertemuan berkala dan forum komunikasi antar-stakeholder bisa menjadi sarana untuk mengevaluasi dan memperbaiki implementasi program.

2. Perencanaan yang lebih terperinci

Proses perencanaan harus mencakup analisis risiko dan strategi mitigasi, terutama untuk menghadapi situasi darurat seperti pandemi. Rencana cadangan dan adaptasi kebijakan perlu dipersiapkan untuk menjaga keberlanjutan program dalam situasi krisis.

**c) *Output***

1. Evaluasi berkala dan perbaikan

Pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap *output* program KUBE untuk mengidentifikasi hambatan dan keberhasilan. Hasil evaluasi harus digunakan untuk memperbaiki dan menyesuaikan program agar lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan.

2. Peningkatan partisipasi aktif

Upaya harus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi aktif anggota KUBE. Sosialisasi yang lebih intensif mengenai manfaat program dan peningkatan insentif dapat mendorong lebih banyak anggota untuk berpartisipasi aktif.

*d) Outcomes*

1. Monitoring dampak jangka panjang

Pemerintah perlu mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang dapat mengukur dampak jangka panjang program KUBE terhadap kesejahteraan masyarakat. Data ini penting untuk melihat efektivitas program dan melakukan penyesuaian kebijakan jika diperlukan.

2. Strategi keberlanjutan

Penyusunan strategi keberlanjutan yang mencakup diversifikasi usaha dan penguatan jejaring kerja sama dengan pihak swasta dan lembaga keuangan. Dengan diversifikasi usaha, KUBE dapat lebih tahan terhadap guncangan ekonomi seperti pandemi.

3. Fasilitasi akses keuangan

Pemerintah perlu memfasilitasi akses KUBE ke sumber-sumber pembiayaan alternatif seperti pinjaman mikro, hibah dari lembaga non-pemerintah, dan investor swasta. Ini akan membantu KUBE untuk mendapatkan modal tambahan guna mengembangkan usaha mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Anggraini, R. S. (2022). Evaluasi Progra, E-Warong KUBE PKH Berdasarkan Permensos RI Nomor 8 Tahun 2017 Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bengkulu. *Jurnal Governance dan Administrasi Publik Vol. 6 No.1*.
- Aprilianti, A. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Program KUBE Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan di Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada*.
- Cahyani, F. W. (2020). Evaluasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. *Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Catherine Althaus, P. B. (2020). *The Australian Policy Handbook*. New York: 2020.
- Debby D. V. Kawengian, J. J. (2015). Evaluasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (Trafficking) Terutama Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara. *E-Journal "Acta Diurna" Volume Iv. No 5*.
- Dewi, D. S. (2022). *Kebijakan Publik Proses, Implementasi Dan Evaluasi*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
- Duadji, Tresiana. (2021) *Implementasi Kebijakan Publik; Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi*. Yogyakarta; Suluh Media
- Evi Satispi, K. M. (2019). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Jakarta: Umj Press.

- Fahmi, A. P. (2021). Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi di Lingkungan Lopang Gede Kota Serang. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 7 No. 1
- Hapsari, A. R. (2023). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Segaran Kecamatan Batujaya. *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol.3 No. 4
- Junaidi, M. G. (2021). Transformasi Pengentasan Kemiskinan Keluarga Fakir Miskin Penerima Program Keluarga Harapan (Studi Di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu). *Administratio*, Vol. 12 (2).
- Krisnina, L. M. (2017). Studi Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan Di Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan Di Kabupaten Sidoarjo. *Kebijakan Dan Manajemen Publik Volume 5, Nomor 3*.
- Lies Fahimah, N. H. (2019). Analisis Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (Kube) Di Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi*, Volume 5 Issue 1.
- M. J. Maspaitella, N. R. (2014). Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial. *Aspirasi* Vol. 5 No. 2.
- Margayaningsih, D. I. (N.D.). Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan.
- Melianti, Y. B. (2022). Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kota Palangka Raya. *Journal Socio Economics Agricultural*, Vol. 17 No. 1
- Muhayati, W, P. Evaluasi Aplikasi Arahkan Di UPT Pelayanan Usaha Perikanan Kecamatan Kundur. *Jurnal Center*, Vol. 1 No. 1.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

- Mustofa L. (2012). *Monitoring Dan Evaluasi Konsep dan Penerapannya Bagi Pembinaan Kemahasiswaan*. Malang: UIN-MALIKI Press.
- Nugroho, S. S. (2020). Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Batu Kota Batu. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, Vol. 6 No. 3*.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Unisri Press.
- Qudus A B. (2017). Evaluasi Program The Sunan Giri Award (Studi Di Desa Sambogunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik). *Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya*.
- Reartha, T, H. (2022). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Semarang. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro*.
- Sawitri, H, A. (2021). Evaluasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Desa Tambaksari, Tirtasari, Karawang. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik Vol. 7 No.1*
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyatkajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosia & Pekerjaan Sosia*. Bandung: Aditama Press.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Bantuan Usaha Ekonomu Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Kelompok Usaha Bersama
- Data Kemiskinan Kabupaten Pringsewu, 2023 (tidak dipublikasikan)

# **LAMPIRAN**